ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN PADA PROVINSI JAWA BARAT

SKRIPSI

oleh:

Nama	: Salsabila Tiya Amalia
NIM	: 20313105
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten

Pada Provinsi Jawa Barat

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Salsabila Tiya Amalia

NIM: 20313105

Prodi: Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARSME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggu menerima hukuman/ sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2024

Penulis,



Salsabila Tiya Amalia

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Pada Provinsi Jawa Barat

Nama	: Salsabila Tiya Amalia
Nomor Mahasiswa	: 20313105
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Mei 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan di Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat

Disusun oleh : SALSABILA TIYA AMALIA

Nomor Mahasiswa : 20313105

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 03 Juli 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

Penguji : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat, dan Ridha-Nya serta memberikan kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang-benderang.

Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat saya, mendoakan yang terbaik untuk saya, dan memberikan dukungan hingga saat ini, Bapak Saryanto dan Ibu Istikomah serta adik saya Shinta yang selalu memberikan semangat tiada henti.

Selain itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu dalam penulisan penelitian hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirahmanirrahim

Alhamudillah, segala puji dan Syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat, Taufiq, dan Ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Pada Provinsi Jawa Barat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Tersusunya skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana strata satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, karena keterbatasan penulis sehingga masih jauh dari kesempurnnaan. Namun, penulis berharap terdapat ilmu yang bermanfaat dari adanya skripsi ini. Dengan dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih saya sampaikan pada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomika Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam menyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Saryanto dan Ibu Istikomah serta Adik saya Shinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat saya di Bekasi, Calya, Jihan, Ratu, Dwi, Ayu dan Tiara yang telah memberikan dukungan dari jauh selama proses pengerjaan skripsi.

5. Teman-teman saya di perkuliahan yang menemani dalam penyusunan skripsi ini.
6. Serta pihak lain yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung mapun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses ini sampai selesai.

Wassalamua'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Yogyakarta, Juni 2024



Salsabila Tiya Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARSME iii
PENGESAHAN UJIAN v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Kajian Pustaka 11
2.1.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 15
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan 15
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah 16
2.2.3 PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto 17
2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) 18
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 19
2.2.6 Tenaga Kerja 20
2.3 Pengaruh antar Variabel 20

2.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan 20
2.3.2 Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan 21
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan 21
2.3.3 Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan 21
2.3.4 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan 22
2.4 Kerangka Pemikirian 23
2.5 Hipotesis Penelitian 23
BAB III 24
METODE PENELITIAN 24
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Definisi Operasional Variabel 24
3.2.1 Variabel Independen 24
3.2.2 Variabel Dependen (Y) 25
3.3 Metode Analisis Data 26
3.3.1 Metode Regresi Data Panel 26
3.3.1 Uji Pemilihan Model Terbaik 28
3.4 Uji Hipotesis 29
3.4.1 Uji Parsial (Uji t) 29
3.4.2 Uji Simultan (Uji F) 30
3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2) 30
BAB IV 31
HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 31
4.1 Deskripsi Data Penelitian 31
4.2 Regresi Data Panel 31
4.2.1 Uji Chow 31
4.2.2 Uji Hausman 32
4.3 Model Regresi Terbaik 33
4.4 Hasil Analisis Data 34
4.4.1 Koefisien Determinasi 34
4.4.2 Uji Analisis F Statistik 34

4.4.3 Uji Analisis T Statistik 34
4.5 Analisis Ekonomi 37
4.5.1 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
4.5.2 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
4.5.3 Analisis Pengaruh DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan 38
4.5.4 Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan 39
4.5.5 Analisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan 39
BAB IV 41
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 41
5.1 Kesimpulan 41
5.2 Implikasi 42
DAFTAR PUSTAKA 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Gini Indonesia 2011-2022 2
Gambar 1. 2 Indeks Gini Provinsi di Indonesia 3
Gambar 1. 3 Pengeluaran Pemerintah pada 10 Kabupaten di Jawa Barat 4
Gambar 1. 4 PDRB ADHK pada 10 Kabupaten di Jawa Barat 2022 5

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz 14
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Capaian IPM 18

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow Test 31
Tabel 4. 2 Uji Hausman 31
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Fixed Effect Model 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Model Fixed Effect 46
Lampiran 2. Model Random Effect 47
Lampiran 3. Model Common Effect 48
Lampiran 4. Uji chow 48
Lampiran 5. Uji Hausman 48
Lampiran 6. Model terbaik (FEM) 49
Lampiran 7. Data yang diolah 50

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan atau disparitas dalam pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang tersedia di beberapa daerah, sehingga tidak semua wilayah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sebanding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten di Jawa Barat dengan nilai Indeks Gini tertinggi dengan kurun waktu selama 2011-2022. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan alat analisis *Eviews* 12. Pemilihan model terbaik pada penelitian ini adalah *Fixed Effect.*

Penelitian ini memberikan hasil yang menjelaskan bahwa secara simultan Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki indeks gini tertinggi tahun 2011-2022. Pada variabel pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan siginfikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel tenaga kerja juga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan tetapi tidak signifikan. Sedangkan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produk Domestik Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja

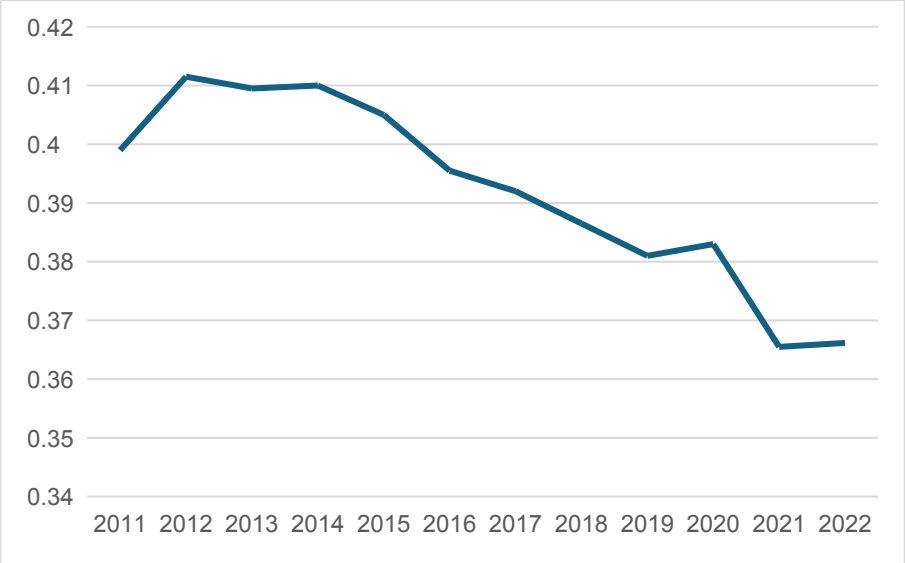
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah distribusi pendapatan yang merata sehingga dapat menunjukkan kesejahteraan di suatu daerah, akan tetapi dalam mencapai tujuan tersebut munculah perm salah yaitu ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang tersedia di beberapa daerah, sehingga tidak semua wilayah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sebanding. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut (Todaro & Smith, 2006) ketimpangan pendapatan yaitu adanya disparitas atau perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh anggota masyarakat, kemudian menyebabkan adanya perbedaan dalam tingkatan pendapatan diantara mereka. Situasi ini menyebabkan peningkatan kekayaan bagi golongan yang sudah mapan secara ekonomi, sementara golongan yang kurang mampu cenderung semakin terpinggirkan secara finansial. Dalam pandangan ini juga disebutkan bahwa ketimpangan pendapatan menggambarkan adanya perbedaan dalam kapasitas individu atau kelompok untuk menghasilkan pendapatan. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan yaitu seperti keahlian, ketrampilan, akses terhadap sumber daya.

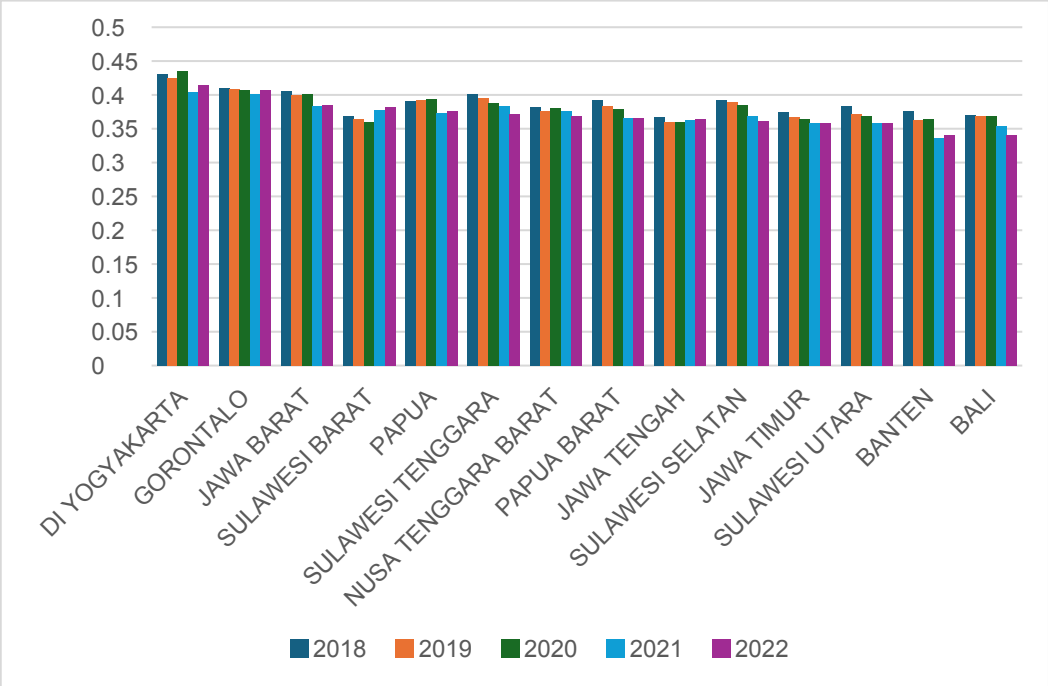
Ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah dapat diukur dengan melihat koefisien gini (gini ratio). Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai 1. Jika Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika mendekati nilai 1 berarti daerah tersebut semakin timpang. Gini ratio juga dapat menunjukkan ketidakmerataan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Ketimpangan pendapatan adalah isu yang sangat penting untuk dipertimbangkan dan memerlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat serta meningkatkan taraf hidup.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Gambar 1. 1 Indeks Gini Indonesia 2011-2022

Ketimpangan pendapatan juga meruapakan salah satu masalah ekonomi dan sosial yang penting di banyak negara termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dan perbedaan karakteristik wilayah ketimpangan pendapatan merupakan salah satu konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Hal ini harus menjadi perhatian utama karena memiliki dampak yang besar pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Pada awal periode, indeks gini meningkat dari 0,41 pada tahun 2011 menjadi sedikit diatas 0,41 pada tahun 2012. Kemudian hingga tahun 2014 relatif stabil. Kemudian, pada periode 2016-2019 indeks gini terus menurun, yang artinya adanya perbaikan dalam ketimpangan pendapatan. Tetapi pada tahun 2019, nilai indeks gini sempat mengalami sedikit kenaikan. Pada periode 2020-2022 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengalami sedikit peningkatan namun masih pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

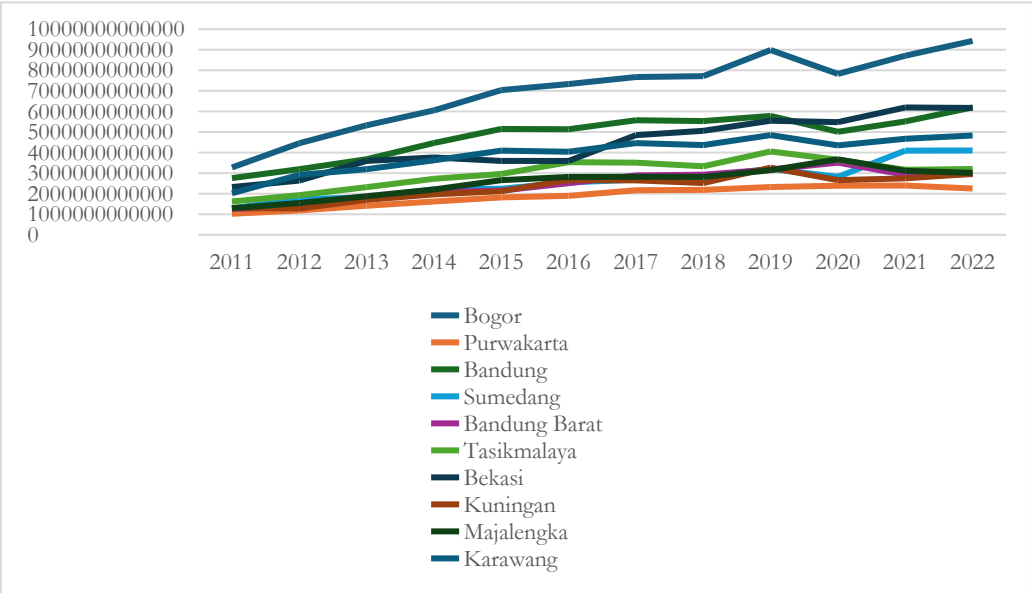


Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut bahwa terdapat 15 provinsi dengan indeks gini tertinggi pada 2018-2022. Pada data tersebut provinsi Jawa Barat masuk kedalam jajaran provinsi dengan indeks gini tertinggi. Pada tahun 2018-2020, indeks gini di Jawa Barat sebesar 0,40 persen. Koefisien gini kemudian turun menjadi 0,38 pada tahun 2021-2022. Artinya dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Meskipun pada Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai kabupaten Jawa Barat tetap tinggi.

Dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan pada kabupaten-kabupaten di Jawa Barat dapat dilakukan dengan analisis mendalam dan terfokus dengan melihat 10 kabupaten di Jawa Barat yang memiliki ketimpangan pendapatan atau nilai indeks gini tertinggi. Dengan memilih kabupaten dengan indeks gini tertinggi, maka akan memudahkan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpngan pendapatan agar dapat mencari solusi yang efektif dan tepat untuk mengatasi masalah di daerah-daerah tersebut. Pada Provinsi Jawa Barat terdapat 10 Kabupaten yang

memiliki tingkat ketimpangan tinggi dilihat pada kurun waktu 2018-2022 yaitu Bogor, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Tasikmalaya, Bekasi, Kuningan, Majalengka Dan Karawang. Kabupaten-Kabupaten di Jawa Barat memiliki kontribusi ekonomi yang bervariasi, seperti pada kabupaten Bandung, Bekasi, dan Bogor memiliki industri yang maju serta tingkat urbanisasi yang tinggi. Meskipun itu ketimpangan pendapatan dimasyarakat tetap terjadi disebabkan karena pada Bandung, Bekasi, dan Bogor merupakan daerah industri besar dan menarik investasi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terdistribusi secara merata seperti pekerja yang terlibat sektor formal dan di industri besar memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, sedangkan penduduk lokal yang tetap bekerja di sektor informal akan mendapatkan upah lebih rendah.



Sumber: (BPS, 2015, 2022)

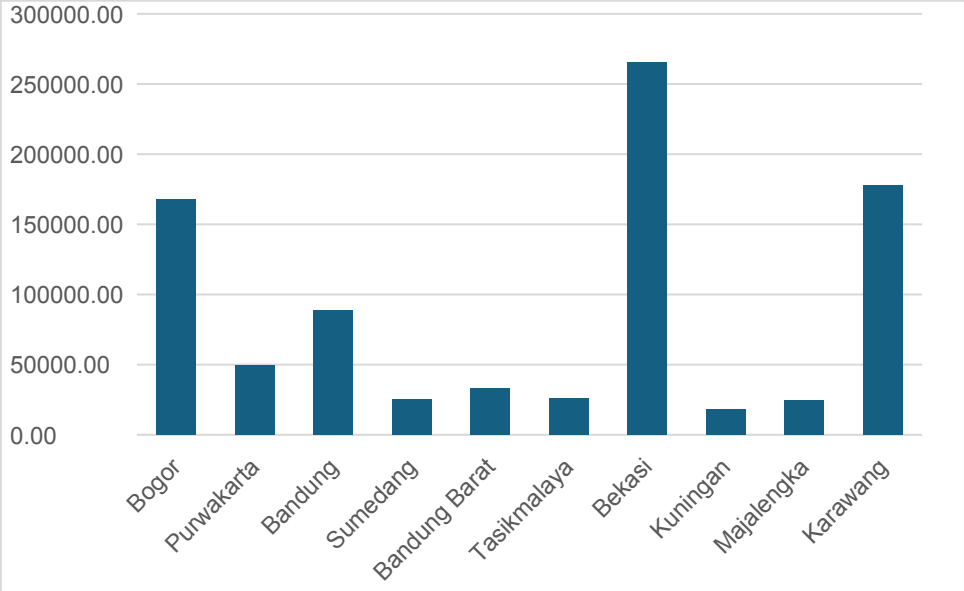
Gambar 1. 3 Pengeluaran Pemerintah pada 10 Kabupaten di Jawa Barat

Dalam melakukan suatu pembangunan suatu daerah harus memiliki sumber daya keuangan sendiri yang cukup untuk membangun dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini dilakukan agar suatu daerah tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya. Bagi pemerintah daerah, kegiatan tersebut merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak.

Sedangkan bagi masyarakat umum, keberhasilan tersebut akan memberikan lapangan pekerjaan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah untuk 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terus meningkat setiap tahunya.

Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan berdasarkan pada (Arsyad, 2010) bahwa penyebab ketimpangan pendapatan diantaranya adalah pembangunan yang tidak merata sehingga diperlukan pendanaan untuk meratakan pembangunan terutama pada infrastruktur publik dengan pengeluaran pemerintah daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU). Maka dari itu untuk meningkatkan pertumbuhan maka diperlukanya kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah daerah yang tepat sasaran. Tetapi, apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan akan meningkat. Kemudian untuk membuat peluang suatu daerah dengan meningkatkan perekonomian dan potensi daerah maka desentralisasi fiskal sangat dibutuhkan. Suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi tentunya akan mendapatkan pasokan dana transfer yang berupa (DAU) yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki fiskal yang rendah.

Berdasarkan teori (Kuznetz, 1995) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan memiliki korelasi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat positif yang ditandai dengan grafik yang meningkat pada jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat negatif yang ditandai grafik yang menurun. Adanya perbedaan pada jangka pendek dan panjang karena pada awal fase pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi.



Sumber: (BPS, 2023)

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa PDRB perkabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 memiliki perbedaan yang cukup besar. Bisa dilihat dari nilai PDRB terendah itu pada Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 18450,34 (milyar), berbeda jauh dengan PDRB Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 265130,82 (milyar). Hal itu dapat disebabkan karena pada Kabupaten Bekasi terdapat kawasan industri yang besar. Kabupaten Bekasi dibantu oleh sektor-sektor industri yang dapat membantu tingkat produktifitas dengan nilai tambah yang juga tinggi. Besarnya nilai PDRB setiap kabupaten yang berbeda menunjukan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi, PDRB yang semakin meningkat maka suatu daerah memiliki potensi pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Penyebab ketimpangan menurut (Arsyad, 2010) selain pembangunan yang tidak merata yaitu adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia atau jumlah tenaga kerja dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja yang dapat bekerja. Melihat baik atau tidaknya suatu perekonomian tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga dapat dilihat dari kualitas masyarakatnya atau bisa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM terdiri dari 3 indikator, yaitu

kesehatan berupa umur harapan hidup, pada instrumen pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah, serta standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM maka akan semakin tinggi juga tingkat produktivitas penduduk, sebaliknya jika nilai IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada 10 kabupaten di Jawa Barat yang memiliki rasio gini tertinggi menunjukkan nilai yang berbeda di setiap daerahnya. Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi diantara kabupaten yang lain.

Jumlah tenaga kerja juga merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Selain itu, Peningkatan jumlah tenaga kerja juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, peningkatan ini harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar peningkatan jumlah tenaga kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Jika jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan tingkat produktivitas, maka akan menyebabkan ketidakmerataan pendapatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Pada Provinsi Jawa Barat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?

5. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?

6. Apakah Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat.
5. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupeten pada Provinsi Jawa Barat.
6. Menganalisis secara simultan pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

2) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membuat kebijakan-kebijakan.

3) Bagi dunia ilmu pengetahuan, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna secara akademik dan praktik dalam pengetahuan tentang potensi pertumbuhan wilayah khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas terkait hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dalam hal penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi pembahasan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas terkait metode penelitian yang meliputi pupulasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan hasil penelitian serta penjelasanya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V Kesimpulan yaitu apa yang didapatkan dari pembahasan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

(Arif & Wicaksani, 2017) melakukan penelitian menganai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Penelitian ini dianalisis dengan metode regresi data panel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t, bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan pengaruh yang positif. Sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur pada tahun 2011-2015.

(Raziq & El Hasanah, 2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model *Random Effect*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan upah minimum serta jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Harun & Maski, 2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2011. Variabel dependen penelitian ini yaitu

ketimpangan pembangunan wilayah diukur dengan metode pengukuran indeks williamson. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

(Anugra et al., 2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provini Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series)* dalam periode tahun 1996-2015. Penelitian ini mencapai hasil yaitu antara pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil estimasi regresi penelitian ini, pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini membuktikan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah masih tidak merata dan masih terpusat pada beberapa daerah yang maju, dilihat dari segi fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas air bersih dan lainya.

(Mangundap et al., 2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon Dan Kota Manado. Data yang digunakan adalah data sekunder pada tahun 2010-2022 dengan analisis yang digunakan adalah data panel. Hasil dari penelitian ini adalah PDRB dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pada pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado.

(Kusuma et al., 2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. Hasil analisis menunjukan bahwa IPM dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhdapa ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa secara bersama-sama bahwa PDRB, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan D.I Yogyakarta.

(Farhan & Sugianto, 2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa dengan periode tahun 2014-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Dari penelitian ini hasil yang dicapai adalah pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, variabel kemiskinan memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap ketimpangan pendapatan, dan pada Indeks Pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

(Ridho & Wijayanti, 2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder 34 Provinsi di Indonesia 2015-2022 dengan alat analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, kemudian DAK dan DBH pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

(Putri & Natha, 2014) melakukan penelitian mengenai analisis tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun

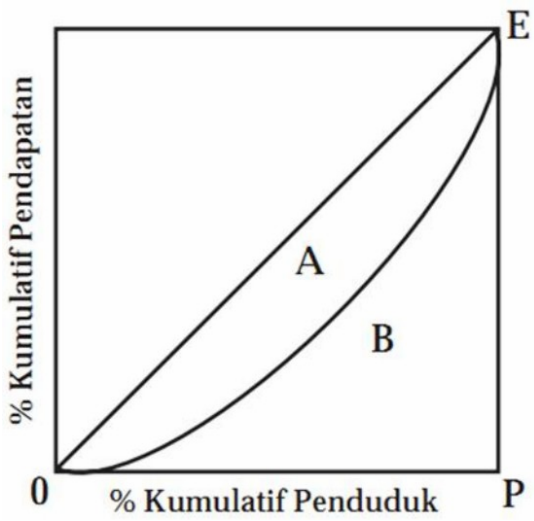
2008-2013 dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatn. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

(Effendy & Djohan, 2022) melakukan penelitian mengenai analisis tentang pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam periode 2007-2020. Berdasarkan penelitian ini, jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pada investasi swasta berpengaruh negatif dan signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada disparitas atau perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh oleh anggota masyarakat, menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pendapatan di antara mereka (Todaro & Smith, 2006). Situasi ini menyebabkan peningkatan kekayaan bagi golongan yang sudah mapan secara ekonomi, sementara golongan yang kurang mampu cenderung semakin terpinggirkan secara finansial.



Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara perentasi penerima pendapatan penduduk dengan persentase penadapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat ditentukan dengan Kurva Lorenz, dilihat dari jauh dan dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika garis lengkung terhadap diagonal semakin jauh, maka ketimpangan yang terjadi semakin buruk.

Dalam (Kuznetz, 1995) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan memiliki korelasi. Gambar kurva U terbalik menunjukkan hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan tingakt ketimpangan. Kurva tersebut menunjukkan bahwa pada jangka pendek hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat positif yang ditandai dengan grafik yang meningkat. Namun, ketika sudah mencapai titik maksimumnya, maka dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat negatif yang ditandai dengan grafik yang menurun. Jadi, peningkatan pada fase awal pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi.

Menurut (Arsyad, 2010) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan pada suatu daerah, yaitu:

a. Pembangunan yang tidak merata antar wilayah
b. Terjadinya penurunan pendapat per kapita yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk.
c. Meningkatnya angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh tingginya nilai investasi padat modal dibandingkan padat karya pada suatu wilayah yang akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan.
d. Terjadinya inflasi karena bertumbuhnya jumlah uang beredar yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi barang.
e. Permintaan yang tidak stabil dari negara maju terhadap barang negara berkembang menyebabkan penurunan nilai tukar di negara berkembang.
f. Mobilitas sosial yang rendah pada suatu daerah.

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Adanya Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh peran pemerintah yang antara lain didukung melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran Pemerintah Daerah dapat dilihat dari belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam satuan uang dengan periode satu tahun yang bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Besarnya kontribusi belanja pemerintah dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori menurut ahli mengenai pengeluaran pemerintah, yaitu:

1) Hukum Wagner

Hukum wagner membahas tentang peningkatan peran pemerintah yang terjadi secara terus-menerus. Peningkatan ini diltunjukkan dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu yang sejalan dengan peningkatan Prdouk Domestik Bruto (PDB). Hukum Wagner juga disebut sebagai "*The Law of Expanding State Expaediture"*. Dasar dari hukum ini adalah hadil pengamatan empiris terhadap negara-negara maju.

2) Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, yang membahas tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahapan pembangunan ekonomi.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini membas bagaimana pengeluaran pemerintah berhubungan dengan ssitem pemungutan pajak. Pemerintah lebih sering meningkatkan pengeluaranya, tetapi peningkatan pengeluaran ini harus didukung oleh pendapatan yang berasal dari pajak. Pada awalnya, masyarakat akan bersedia untuk membayar pajak, tetapi suatu waktu ketika pajak dianggap terlalu tinggi, mereka akan menolak untuk membayar pajak.

2.2.3 PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian oleh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, maka dari itu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) bisa menjadi gambaran bagaimana kesejahteraan yang diperoleh penduduk seuatu wilayah tertentu. Tinggi rendahnya suatu pertumbuhan output atau PDRB akan mencerminkan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, nilai PDRB secara tidak langsung bisa melihat kesejahteraan masyarakat. (Todaro & Smith, 2006)

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang perhitunganya di dasarkan pada periode waktu berlaku. PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan pergeseran ekonomi suatu daerah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

   Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah jasa dan barang yang dalam perhitunganya didasarkan pada patokan harga di tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat keunggulan atau kualitas potensi suber daya yang dimiliki suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga bisa digunakan sebagai alat untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dihasilkan dari pendapatan APBN yang digunakan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang memiliki kontribsui pada total penerimaan daerah.

Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerahnya (Putri dan Natha, 2014). Oleh karena itu, maka DAU dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah atau dapat menciptakan pemerataan keuangan antar daerah.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator dari pembangunan ekonomi suatu negara yang diukur dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pada tahun 2010, UNDP atau *Unit Nations Development Programme* (UNDP) membuat konsep pengukuran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan indikator awal berupa Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kemudian disempurnakan pada tahun 2014, UNDP merubah indikator pengukuruan Indeks Pembangunan Manusia dengan indikator sebagai berikut:

1. Kesehatan dinilai dari Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
2. Pendidikan yang dinilai berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai pengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM juga digunakan untuk menentukan target pembangunan dan dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Capaian Pembangunan manusia di suatu wilayah dapat diklasifikasian ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat tinggi	IPM $\geq$ 80
Tinggi	70 $\leq$ IPM < 80
Sedang	60 $\leq$ IPM < 70
Rendah	IPM < 60

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2016)

2.2.6 Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap orang yang mampu melakukan pekerjan dan dapat menghasilkan barang atau jasa disebut tenaga

kerja. Jumlah tenaga kerja yaitu jumlah seluruh penduduk yang masuk dalam usia kerja dan dianggap dapat bekerja. Tenaga kerja yang memiliki produktivitas dan ketrampilan yang tinggi dapat membantu perkebmbangan suatu negara. Partisipasi tenaga kerja juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta bersama dalam masyarakat.

Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitasnya, yaitu:

1. Tenaga kerja kasar yaitu adalah tenaga kerja yang memilki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak formal serta tidak memiliki keterampilan khusus dalam suatu pekerjaan.
2. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang didapatkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
3. Tenaga kerja terdidik yaitu adalah tenaga kerja yang memilki kemampuan di bidang spesifik dengan menempuh pendidikan formal.

2.3 Pengaruh antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah adalah alat yang dianggap paling efektif untuk memperbaiki perekonomian. Konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah sebagai pelayanan dan pembangunan infrastruktur supaya mempermudah mobilitas tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan di masyarakat sehingga ketimpangan menurun (Sukirno, 2006).

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan adalah negaitif didukung dari penelitian (Harun & Maski, 2012). Pengeluaran pemerintah mencakup kegiatan belanja barang atau jasa oleh pemerintah yang terdiri dari pembiayaan administrasi, belanja pegawai, dan pembiyaaan pembangunan infrastruktur. Pengeluran pemerintah yang tepat sasaran dapat mengatasi ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

2.3.2 Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian di suatu daerah. Nilai PDRB setiap daerah itu berbeda tengantung sumber daya yang dimiliki. Tinggi rendahnya nilai PDRB akan menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut (Kusuma et al., 2019) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perlu dilakukan perbandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan, dengan PDRB sebagai indikator yang digunakan. Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif sejalan dengan penelitian (Mangundap et al., 2024) yaitu ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik maka tingkat ketimpangan pendapatan akan turun

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuan daerahnya. Menurut (Putri dan Natha, 2014) dan alokasi umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi dana untuk belanja pembangunan menjadikan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengaruh DAU terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif sejalan dengan penelitian (Ridho & Wijayanti, 2022) yaitu, ketika jumlah dana alokasi umum ditingkatkan maka ketimpangan pendapatan di akan menurun.

2.3.3 Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan

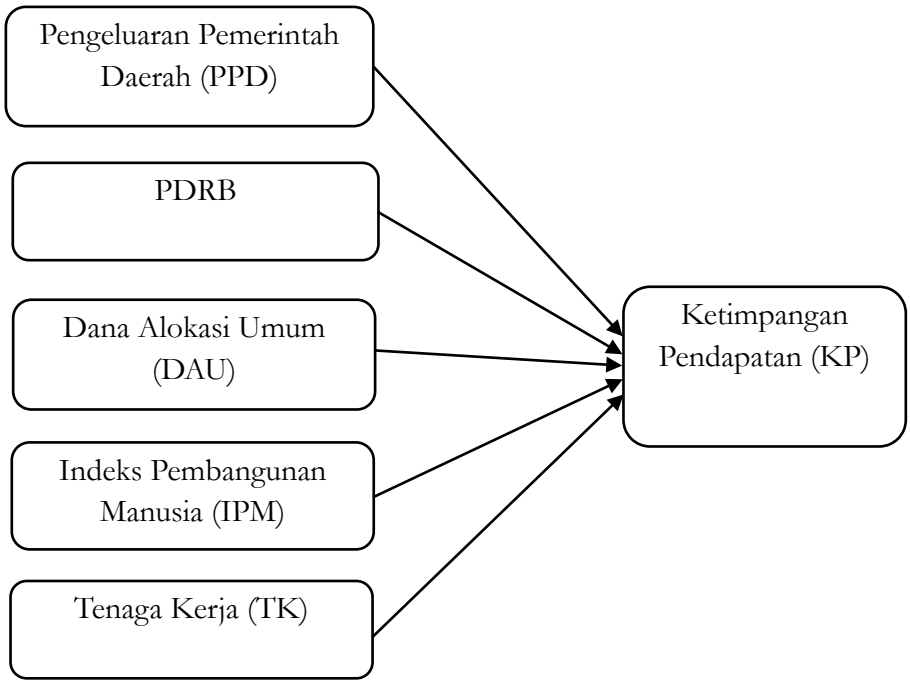
Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mempunyai peran dalam mengukur kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah yang nantinya akan membantu dalam pembangunan daerah. Apabila suatu daerah memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan meningkatkan produktifitas dan akan mendorong kesejahteraan manusia. Jika nilai IPM maka setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki pendapatan yang tinggi. Apabila setiap daerah memiliki IPM yang tinggi dan merata dengan ditandai adanya persamaan akses serta kualitas pendidikan serta kesehatan, maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, hal itu sejalan dengan penelitian oleh (Farhan & Sugianto, 2022) dimana IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika nilai IPM naik maka akan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

2.3.4 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Adanya partisipasi tenaga kerja yang produktif dan dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah tenaga kerja produktif tinggi maka output yang dihasilkan juga akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada PDRB perkapita kemudian naiknya PDRB perkapita dan konsumsi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, sehingga akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Maka, hubungan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif sejalan dengan penelitian oleh (Effendy & Djohan, 2022) dimana jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika jumlah tenaga kerja naik, maka tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun.

2.4 Kerangka Pemikirian



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga Pengeluaran Daerah dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga PDRB dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Dana Alokasi Umum ini berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.
5. Diduga Tenaga Kerja dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dengan alat analisis data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* yaitu berupa 10 kabupaten yang memiliki Indeks Gini tertinggi di Jawa Barat dengan periode waktu 2011-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu variabel dependen yaitu indeks gini dipengaruhi oleh variabel dependen yaitu Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produk Domestik Regional Bruot (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen (yang memengaruhi) dan variabel dependen (yang terpengaruh) dan keduanya digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel dependen yaitu indeks gini atau ketimpangan pendapatan (Y) dan variabel dependen Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD), PDRB, Dana Alokasi Umum DAU, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja (TK).

3.2.1 Variabel Independen

Variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan pada variabel dependen. Peneliti memanipulasi atau mengendalikan variabel independen dalam eksperimen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah daerah (X1), PDRB (X2), DAU (X3), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja (X4) pada Kabupaten di Jawa Barat dalam periode tahun 2011-2022.

a. Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD)

   Data yang digunakan adalah Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah pada 10 Kabupaten di Jawa Barat dengan Indeks Gini tertinggi periode

waktu 2011-2022. Data pengeluaran pemerintah di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

b. PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu negara tertentu. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 10 Kabupaten di Jawa Barat dengan Indeks Gini tertinggi periode waktu 2011-2022. yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mnurunkan perbedaan fiskal antar daerah sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhanya. Data DAU di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Pembangunan suatu daerah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Data yang diperoleh berasal dari BPS, dalam rentang waktu 2011-2022 pada 10 kabupaten di Jawa Barat dengan nilai indeks gini tertinggi.

e. Tenaga Kerja (TK)

Tenaga kerja mengacu pada jumlah orang yang bekerja atau individu yang masuk usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan untuk memproduksi barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Data diambil dari BPS tahun 2011-2022.

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang dianggap sebagai hasil atau respon dari perubahan pada variabel independen. Ini adalah variabel yang diukur atau diamati untuk melihat dampak dari variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen berupa ketimpangan pendapatan.

a. Ketimpangan Pendapatan (Y)

Ketimpangan pendapatan merupakan disparitas atau perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di antara suatu populasi atau masyarakat. Pada variabel ketimpangan pendapatan data yang digunakan adalah indeks gini menurut 10 kabupaten di Jawa Barat dengan nilai indeks gini tertinggi periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dengan satuan persen.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode data panel. Metode data panel merupakan metode yang menggabungkan data time series dan cross section. Artinya, data panel adalah kumpulan data yang berasal dari pengamatan yang dilakukan secara berulang pada data cross-sectional pada waktu yang berbeda untuk subjek yang sama.

3.3.1 Metode Regresi Data Panel

Dengan pendekatan ini, analisis regresi pada data panel memungkinkan untuk mempelajari perilaku beberapa objek tersebut selama jangka waktu tertentu. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

Keterangan:

KP = Ketimpangan Pendapatan (%)

PPD = Pengeluaran Pemerintah Daerah(Trilyun)

PDRB = PDRB (Trilyun)

DAU = DAU (Trilyun)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

TK = Tenaga Kerja (Juta jiwa)

Dalam (Widarjono, 2018) Ada beberapa metode dalam menentukan estimasi model regresi dengan data panel. Pada regresi data panel, terdapat tiga pendekeatan yaitu:

1. *Common Effect Models (CEM)*

   Pendekatan *Common Effect Models* merupakan metode paling sederhana dalam estimasi data panel dengan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan antar individu dan waktu digunakan metode *oldinary least squares* (OLS) untuk mengestimasi pada model ini. Persamaan *Common Effect Models (CEM)* dirumuskan sebagai berikut :

2. *Fixed effect Models* (FEM)

   Pendekatan FEM merupakan pendekatan yang memperhatikan data cross section dalam data panel yang mana intersep unit cross section dapat berbeda, tetapi slope keofisien tetap. Persamaan *Fixed Effect Models* (FEM) dirumuskan sebagai berikut:

3. *Random Effect Models* (REM)

   Pada Metode ini mengestimasi data panel Dimana variabel gangguan kemungkinan saling berhubungan antar waktu dan individu. Persamaan *Random Effect Models* (REM) dirumuskan sebagai berikut:

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel, dapat dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang tepat agar menghasilkan regresi yang baik. Langkah pertama yang dilakukan untuk memperoleh model yang tepat pertama dilakukan adalah dengan menggunakan regresi dengan

model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* setelah itu dilakukan test dengan uji Chow untuk mendapatkan hasil regresi yang baik dari kedua model. Jika yang baik adalah *Fixed Effect Model* maka selanjutnya akan dilakukan test dengan dilakukan uji Hausman untuk menentukan model yang terbaik antara model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model.*

3.3.1 Uji Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow (Uji F-Statistik)

Uji chow digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

H0 = Menggunakan *Common Effect Models*

Ha = Menggunakan *Fixed Effect Models*

Berdasarkan nilai *p-value* jika diketahui signifikan dan hasil estimasi tidak lebih dari 5% atau 10% maka menggunakan metode estimasi *fixed effect models*. Sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih dari 5% atau 10% maka metode estimasi menggunakan *common effect models.*

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Dengan asumsi :

H0 = Menggunakan *Fixed Effect Models*

Ha = Menggunakan *Random Effect Models*

Untuk melakukan uji Hausman maka dapat melihat dari nilai P-value. Apabila p-value signifikan, kurang dari 5% maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila p-value tidak signifikan atau lebih dari 5%, maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect.*

3.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau inferensi tentang suatu parameter dalam suatu populasi berdasarkan sampel data. Secara umum, proses uji hipotesis melibatkan formulasi hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), pengumpulan data, dan penggunaan analisis statistik untuk menilai apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t), simultan (uji F) dan koefisien determinasi (R^2). Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut :

3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t parsial digunakan untuk mengevaluasi signifikansi kontribusi individu dari masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen..Jika nilai probabilitas kurang dari 5% maka menolak H_0 yang artinya berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka akan menerima H_0 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

a. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

   $H_0 = \beta_0 = 0$ Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

   $H_a = 1 < 0$ Pengeluaran berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

b. Variabel PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

   $H_0 = \beta_0 = 0$ PDRB tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

   $H_a = 1 < 0$ PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan berpengaruh negative di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

c. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan

   $H_0 = \beta_0 = 0$ Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

   $H_a = 1 < 0$ Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

d. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negaif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

e. Variabel Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan, atau uji F, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah adanya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dilihat dari nilai probabilitas lebih besar dari 5% dan F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima (signifikan). Hal ini menunjukan bahwa beberapa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai probabilitas lebih besar 5% dan F hitung < F tabel, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukan bahwa beberapa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, DAU, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan Pendapatan.

Secara matematis, koefisien determinasi (R-squared) dihitung dengan membagi varians yang dijelaskan oleh model dengan total varians dari variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0% hingga 100%. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data. Semakin tinggi nilai R-squared, semakin besar proporsi variabilitas yang

dapat dijelaskan oleh model. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai tinggi tidak selalu menjamin keakuratan atau relevansi model.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada 10 Kabaten di Jawa Barat yang memiliki indeks gini tertinggi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan selama 12 tahun, dari tahun 2011 hingga 2022. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks Gini, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tenaga Kerja. Untuk menganalisis dan mengolah data penelitian ini menggunakan program software *E-views* 12 serta model regresi menggunakan data panel. Pada analisis hasil regresi dalam penelitian ini menjelaskan model regresi dan uji sesuai untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang akan dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4.2 Regresi Data Panel

Dalam metode regresi data panel terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu, *common effect model, fixed effect model, dan random effect model.* Untuk menemukan model estimasi terbaik maka perlu dilakukan uji data panel dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman*.

4.2.1 Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model paling baik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

H_o: menggunakan model estimasi *Common effect.*

H_a: menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.840681	(9,105)	0.0049
Cross-section Chi-Square	26.150339	9	0.0019

Berdasarkan hasil pengujian uji chow dihasilkan angka probabilitas Cross-Section Chi-square sebesar 0.0019 yang menunjukkan nilai p value lebih kecil daripada α = 5% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari uji chow adalah menolak H_o, oleh karena itu, menggunalakn model *Fixed Effect* adalah pilihan yang baik.

4.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_o: menggunakan model estimasi *Random effect.*

H_a: menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

Tabel 4. 2 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.158962	5	0.0483

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *Eviews 12* maka didapatkan nilai hasil probabilitas = 0.0483, yang berarti probabilitas lebih kecil dari α = 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada *uji hausman* adalah menolak H_o sehingga model yang lebih baik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model.*

4.3 Model Regresi Terbaik

Setelah menguji data panel dengan tiga cara, maka model yang terbaik yang berhasil diperoleh adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.2136	0.1318	-1.6207	0.1081
PPD	-0.0152	0.0065	-2.3256	0.0220
PDRB	0.0002	0.0003	0.7823	0.4358
DAU	42.048	20.479	2.0532	0.0425
IPM	0.0087	0.0020	4.3023	0.0000
TK	-0.0412	0.0465	-0.9059	0.3671
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.4591	Mean dependent var		0.3603
Adjusted R-squared	0.3870	S.D. dependent var		0.0317
S.E. of regression	0.0248	Akaike info criterion		-4.4436
Sum squared resid	0.0647	Schwarz criterion		-4.0877
Log likelihood	281.17	Hannan-Quinn criter.		-4.2947
F-statistic	6.3682	Durbin-Watson stat		1.7006
Prob(F-statistic)	0.0000			

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas maka selanjutnya melakukan analisis guna mengetahui terkait pengaruh antara variabel independen Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja terhadap variabel dpeneden Ketimpangan Pendapatan. Analisis ini terdiri dari koefisien determinasi, uji F-statistic, dan uji t statistic.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) diunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja mampu menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen Ketimpangan Pendapatan.

Berdasarkan hasil dari regresi *Fixed Effect Model* pada tabel 4.3 diperoleh R-*Square* sebesar 0.3870, menunjukkan bahwa variabel dependen ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu, Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja sebesar 38,70%. Sementara itu, sisanya sebesar 61,30% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.4.2 Uji Analisis F Statistik

Pengujian analisis F statistik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Pada tabel 4.3 yaitu hasil regresi *Fixed Effect* menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari Tingkat signifikasi $\alpha = 5\%$ (0,00000 < 0,05). Maka H_0 ditolak yang artinya ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan.

4.4.3 Uji Analisis T Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui masih-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan Uji analisis distribusi t statistik. Dengan melakukan perbandingkan probabilitas t dengan nilai alpha 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis. Berikut hasil uji t :

a. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Pengeluaran Pemerintan Daerah berpengaruh negative terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0220 > α (5%) dengan nilai koefisien -0.0152 maka menolak H_0 sehingga variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di Jawa Barat tahun 2011-2022.

b. Variabel PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ PDRB tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_a = 1 < 0$ PDRB berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Barat tahun

Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4358 > α (5%) dengan koefisien 0.0002 maka gagal menolak H_0 sehingga variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

c. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0425 > α (5%) maka menolak H_0 sehingga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh berdasarkan nilai koefisien sebesar 42.048. Maka Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Jawa Barat tahun 2011-2022.

d. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha$ (5%) maka menolak H_0 sehingga variabel IPM berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar 0.0875 IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022.

e. Variabel Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0 = \beta_0 = 0$ Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

$H_a = 1 < 0$ Tenaga Kerja berpengaruh negatf terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.

Variabel Tenaga Kerja memiliki nilai probabilitas sebesar $0.3671 < \alpha$ (5%) dengan koefisien -0.0421 maka menolak H_0 sehingga variabel Tenaga Kerja berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar Tenaga Kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.1 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* pada pengeluaran pemerintah daerah bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0220 dengan nilai koefisien -0.0152. Maka variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin besarnya jumlah pengeluaran pemerintah maka tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun. Hasil Penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wagner, yaitu untuk meningkatkan perekonomian maka pemerintah akan menggunakan pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Harun & Maski, 2012) yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dan diarahkan dengan baik melalui investasi dalam pendidikn, kesehatan dan pembangunan infrastruktur serta pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan seperti pengembangan atau pemberdayaan ekonomi dan bisa melalui program sosial seperti bantuan, subsidi dan jaminan sosial.

4.5.2 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui nilai probabilitas pada variabel PDRB terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 0.4358 dengan nilai koefisien 0.0002. Maka, variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Maka hasil analisis ini tidak sejalan dengan hipotesis yaitu variabel PDRB berpengaruh negatif secara signfikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi di bebearapa kabupaten, terutama kabupaten yang menjadi pusat industri seperti Kabupaten Karawang dan kabupaten Bekasi. Sementara itu kabupaten lain yang kurang berkembang tidak merasakan manfaat yang sama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan oleh (Raziq & El Hasanah, 2023) yaitu variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun PDRB tinggi tetapi tidak dapat mempengaruhi atau tidak dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. PDRB dapat menunjukkan pertumbuha ekonomi, tetapi tidak dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara langsung. Ini karena PDRB tidak dapat menunjukkan bagaimana pendapatan didistribusikan antar individu atau kelompok masyarakat. Adanya kenaikan PDRB tidak menjamin seluruh masyarakat dapat menikmatinya, kenaikan tersebut mungkin hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi.

4.5.3 Analisis Pengaruh DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0425 dengan nilai koefisien sebesar 42.0486. Artinya, bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin besar alokasi Dana Alokasi Umum maka makin meningkat ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena pengolaan dana yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Pengelolaan dana atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran akan mengurangi pengaruh DAU dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Putri & Natha, 2014) yaitu variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meningkatnya DAU dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan disebabkan karena semakin tinggi penyebaran DAU masing-masing daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah sehingga semakin tinggi juga kesenjangan antar kabupaten. Seperti banyak kabupaten yang menggunakan DAU untuk membiayai proyek infrastruktur besar yang impulsif. Meskipun DAU dibuat untuk mendistribusikan dana secara merata, jika dalam pelaksanaanya dana seringkali tidak ideal dengan kebutuhan dan potensi suatu daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Dana Alokasi Umum juga seringkali disalahgunakan oleh pemerintah atau pejabat dengan praktik korupsi sehingga dana tersebut tidak mencapai dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

4.5.4 Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui nilai probabilitas sebesar 0.0000 dengan koefisien 0.0087. Maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka variabel IPM berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat. Artinya, semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi, karena adanya ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan serta kebijakan pemerintah. Ketimpangan inilah yang akan membuat hanya sebagian masyarakat merasakan manfaat dan keuntungan, sementara daerah lain tetap tertinggal. Pemerintah lebih focus pada daerah-daerah dengan IPM yang tinggi, sementara daerah dengan IPM rendah tidak mendapat perhatian yang sama. Seperti pada Kabupaten Bandung yang memiliki banyak universitas dan sekolah. Tetapi, ketimpangan pendapatan tetap tinggi karena hanya sebagian populasi saja yang dapat mengaksesnya, sementara yang lain seperti di pedesaan tetap tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Arif & Wicaksani, 2017) yaitu, variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif secara signfikan disebabkan bahwa pada IPM terdapat salah satu instrument yaitu tingkat harapan hidup yang merupakan faktor kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang produktif. tingkat harapan hidup yang tergolong tinggi menyebabkan peningkatan jumah tenaga kerja yang produktif dan menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, tetapi sayangnya ini hanya terjadi di daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, terutama di daerah industri atau daerah berpendapatan tinggi. Akibatnya, pertumbuhan yang tidak merata dan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi.

4.5.5 Analisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* diketahui variabel tenaga kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3671 dengan nilai koefisien sebesar -0.0421. Maka variabel Tenaga Kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat. Artinya banyaknya tenaga kerja belum terlalu berpengaruh untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi, karena tenaga pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Barat

kemungkinan lebih banyak di sektor informal yang umumnya memiliki upah yang rendah dan tidak tetap.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Effendy & Djohan, 2022) dimana jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yaitu ketika jumlah tenaga kerja naik, maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi apabila ketika tenaga kerja yang meningkat tetapi tidak mempunyai ketrampilan dalam bekerja maka produktivitas akan menurun dan menyebabkan upah rendah. Dengan demikian, walaupun ketersediaan tenaga kerja meningkat tetapi belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model estimasi regresi data panel setelah dilakukan uji Hausman yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect*. Hasil koefisien uji determinasi (R2) adalah sebesar sebesar 0.3870 yang artinya sebanyak 38.70% variasi atau perubahan pada variabel ketimpangan pendapatan yang dapat dijelaskan oleh Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja sedangkan sisanya sebesar 61.30% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin besarnya jumlah pengeluaran pemerintah daerah maka tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel PDRB variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat. Artinya besar kecilnya PDRB tidak mempengaruhi pada ketimpangan pendapatan.
4. Variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat. Artinya, jika DAU mengalami peningkatan maka ketimpangan pendapatan juga mengalami kenaikan. Kenaikan DAU yang tidak tepat sasaran akan menyebabkan ketidakmerataan pendapatan.
5. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Jawa Barat.. Artinya, semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi juga ketimpangan pendapatan.

6. Tenaga kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan maka belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat akan menurun.

5.2 Implikasi

1. Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Agar pengeluaran pemerintah tetap terus bisa membantu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan maka pemerintah perlu menyusun anggaran yang tepat sasaran dan mengalokasikan pada program yang secara langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Pengurangan belanja yang tidak terlalu penting dilakukan dengan pengurangan akan membuat pengeluaran pemerintah lebih efisien. Pengurangan belanja perjalanan dinas juga dapat dilakukan untuk mengurangi pengeluaran dan dapat dialihkan menjadi belanja modal untuk membangun fasilitas-fasilitas publik.
2. PDRB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Maka dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan kualitas dalam beberapa aspek seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan memberikan dukungan untuk pengemban ekonomi lokal. Adapun dengan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara ekonomi maka PDRB dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Maka jika nilai DAU mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, seharusnya dana yang diterima oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai harus dikurangi, dan digunakan untuk belanja modal. Kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan infrastruktur yang merata sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

4. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika IPM mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan juga akan naik. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah agar masing-masing daerah dapat memiliki akses yang merata pada seluruh instrument IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada daerah dengan nilai IPM tinggi, tetapi semua daerah harus mempunyai akses mudah terhadap instrument dari IPM itu sendiri.
5. Tenaga kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan maka belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat akan menurun. Maka dari itu, pemerintah harus memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar tingkat produktifitas akan meningkat kemudian akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anugra, R., Marwa, T., & Imelda. (2016). Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(1), 31–40. https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8773

Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, *6*, 323–328.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (4th ed.). UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015. *Berita Resmi Statistik*, *57*, 1–15.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--maret-2023.html

BPS. (2015). *Statistika dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa barat*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/publication/2015/11/13/137867212c1803fd6b865801/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota-jawa-barat-2015.html

BPS. (2022). *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/publication/2022/11/30/8ac74aca7c23461c90cf491d/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2022.html

BPS. (2023). *PDRB ADHK menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/indicator/155/101/1/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota.html

Effendy, C. A., & Djohan, S. (2022). Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan antar kabupaten/kota. *Kinerja*, *18*(4), 680–688. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10558

Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(4), 243–258. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29

Harun, L., & Maski, G. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. *1*(2).

Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017*. *1*(3). https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/viewFile/2679/1075

Kuznetz, S. (1995). Economic growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, *110*(1). https://doi.org/10.2307/2118443

Mangundap, V. H., Kumenaung, A. G., Siwu, H. F. D., & Mangundap, V. H. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon Dan Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *24*(2), 25–36.

Putri, N. putu V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *4*(1), 41–49.

Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *2*(1), 12–21. https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art2

Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*

Dan Keuangan, *1*(1), 71–81. https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7

Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi/Edisi Kesembilan, Jilid 1*. Erlangga.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/18/24 Time: 15:50
Sample: 2011 2022
Periods included: 12
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.213612	0.131801	-1.620723	0.1081
PP1	-0.015267	0.006564	-2.325688	0.0220
PDRB1	0.000272	0.000348	0.782343	0.4358
DAU1	42.04860	20.47916	2.053238	0.0425
IPM	0.008751	0.002034	4.302375	0.0000
TK1	-0.042170	0.046549	-0.905919	0.3671

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.459195	Mean dependent var	0.360375
Adjusted R-squared	0.387087	S.D. dependent var	0.031729
S.E. of regression	0.024841	Akaike info criterion	-4.436208
Sum squared resid	0.064791	Schwarz criterion	-4.087771
Log likelihood	281.1725	Hannan-Quinn criter.	-4.294706
F-statistic	6.368205	Durbin-Watson stat	1.770649
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2. Model *Random Effect*

Dependent Variable: GINI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/18/24 Time: 16:17
Sample: 2011 2022
Periods included: 12
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 120
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.144879	0.089579	-1.617334	0.1086
PP1	-0.010351	0.004322	-2.394728	0.0183
PDRB1	-0.000278	9.21E-05	-3.022475	0.0031
DAU1	20.85893	16.18147	1.289063	0.2000
IPM	0.007399	0.001374	5.384193	0.0000
TK1	0.032766	0.014982	2.186964	0.0308

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.008055	0.0952
Idiosyncratic random	0.024841	0.9048

Weighted Statistics

R-squared	0.248672	Mean dependent var	0.239617
Adjusted R-squared	0.215719	S.D. dependent var	0.028797
S.E. of regression	0.025503	Sum squared resid	0.074145
F-statistic	7.546269	Durbin-Watson stat	1.670887
Prob(F-statistic)	0.000004		

Unweighted Statistics

R-squared	0.317470	Mean dependent var	0.360375
Sum squared resid	0.081770	Durbin-Watson stat	1.515072

Lampiran 3. Model *Common Effect*

Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/18/24 Time: 16:17
Sample: 2011 2022
Periods included: 12
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.116060	0.074295	-1.562139	0.1210
PP1	-0.007690	0.004065	-1.891672	0.0611
PDRB1	-0.000338	7.44E-05	-4.545008	0.0000
DAU1	2.484477	14.97281	0.165933	0.8685
IPM	0.007115	0.001143	6.227717	0.0000
TK1	0.041276	0.013335	3.095291	0.0025

R-squared	0.327516	Mean dependent var	0.360375
Adjusted R-squared	0.298021	S.D. dependent var	0.031729
S.E. of regression	0.026584	Akaike info criterion	-4.368288
Sum squared resid	0.080566	Schwarz criterion	-4.228914
Log likelihood	268.0973	Hannan-Quinn criter.	-4.311687
F-statistic	11.10413	Durbin-Watson stat	1.572260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Uji *chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.840681	(9,105)	0.0049
Cross-section Chi-square	26.150339	9	0.0019

Lampiran 5. Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.158962	5	0.0483

Lampiran 6. Model terbaik (FEM)

Fixed Effect

Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 05/18/24 Time: 15:50
Sample: 2011 2022
Periods included: 12
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.213612	0.131801	-1.620723	0.1081
PP1	-0.015267	0.006564	-2.325688	0.0220
PDRB1	0.000272	0.000348	0.782343	0.4358
DAU1	42.04860	20.47916	2.053238	0.0425
IPM	0.008751	0.002034	4.302375	0.0000
TK1	-0.042170	0.046549	-0.905919	0.3671

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.459195	Mean dependent var	0.360375
Adjusted R-squared	0.387087	S.D. dependent var	0.031729
S.E. of regression	0.024841	Akaike info criterion	-4.436208
Sum squared resid	0.064791	Schwarz criterion	-4.087771
Log likelihood	281.1725	Hannan-Quinn criter.	-4.294706
F-statistic	6.368205	Durbin-Watson stat	1.770649
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7. Data yang diolah

Kabupaten	Tahun	Gini (Y)	Pengeluaran Pemerintah (X1)	PDRB (X2)	DAU (X3)	IPM (X4)	Tenaga Kerja (X5)
Bogor	2011	0,41	3,274956059	98,37872	0,001326116914	66,7	1,852165
Bogor	2012	0,42	4,453109682	104,28698	0,001672614142	65,7	1,995032
Bogor	2013	0,38	5,324125859	110,68528	0,001887770112	66,7	2,131478
Bogor	2014	0,39	6,051177096	117,3395	0,002055944991	67,4	2,137954
Bogor	2015	0,42	7,03657581	124,48698	0,002163439062	67,8	2,083234
Bogor	2016	0,4	7,330903331	131,76037	0,001917780234	68,3	2,155684
Bogor	2017	0,38	7,671640208	139,56145	0,001902004175	69,1	2,351753
Bogor	2018	0,356	7,715348116	148,20335	0,001919023527	69,7	2,356875
Bogor	2019	0,354	8,984354016	156,87601	0,002034853421	70,7	2,539196
Bogor	2020	0,372	7,82387166	154,1136	0,001849797	70,4	2,342939
Bogor	2021	0,340	8,708394	159,58955	0,001863199	70,6	2,445768
Bogor	2011	0,41	9,429443	167,96618	0,00186583	71,2	2,516743
Bogor	2012	0,42	1,025644318	29,89301	0,000517350526	66,7	0,340411
Bogor	2013	0,38	1,186324405	31,93434	0,000635154048	65,7	0,375959
Bogor	2014	0,39	1,414651207	34,21642	0,000722162721	66,7	0,360398
Bogor	2015	0,42	1,621967838	36,17247	0,000786592072	67,4	0,375455
Bogor	2016	0,4	1,820012836	37,89902	0,000808114	67,8	0,371543
Bogor	2017	0,38	1,896434037	40,1699	0,000857566481	68,3	0,382463
Bogor	2018	0,356	2,168343804	42,2393	0,00085538941	69,1	0,392747
Bogor	2019	0,354	2,184982023	44,34165	0,00085441967	69,7	0,395512
Purwakarta	2011	0,34	2,325063736	46,27821	0,000889747462	65,5	0,405052
Purwakarta	2012	0,39	2,389179013	45,29324	0,000810271	66,3	0,384543
Purwakarta	2013	0,39	2,397793	46,84015	0,000799003	67,1	0,391444
Purwakarta	2014	0,37	2,252045	49,29337	0,000799	67,3	0,402513
Purwakarta	2015	0,35	2,757789675	51,25025	0,001202706641	67,8	1,248267
Purwakarta	2016	0,36	3,191952761	54,46816	0,001518230253	68,9	1,323166
Purwakarta	2017	0,39	3,676316493	57,69059	0,001730063709	69,3	1,407503
Purwakarta	2018	0,397	4,465443976	61,10025	0,0018977693	70,0	1,490031
Purwakarta	2019	0,4	5,148743693	64,70152	0,001957538845	70,7	1,438365
Purwakarta	2020	0,41	5,133749495	68,80485	0,002096677101	70,8	1,507954
Purwakarta	2021	0,4	5,571061143	73,03945	0,002059845225	71,0	1,584391
Purwakarta	2022	0,37	5,530449456	77,61322	0,002060202697	71,6	1,575661
Purwakarta	2011	0,34	5,782093595	82,54744	0,002149817107	65,5	1,678121
Purwakarta	2012	0,39	5,011245983	81,06097	0,001967815	66,3	1,569974
Purwakarta	2013	0,39	5,514614	83,94937	0,001947251	67,1	1,637019
Purwakarta	2014	0,37	6,194661	88,43796	0,00194725	67,3	1,708642
Purwakarta	2015	0,35	1,286700673	15,39093	0,000730821109	67,8	0,457222
Purwakarta	2016	0,36	1,738144386	16,40081	0,000923623866	68,9	0,487639
Purwakarta	2017	0,39	1,819137481	17,19451	0,001036263413	69,3	0,483648
Bandung	2011	0,36	2,210693614	18,00469	0,001104417363	67,8	0,515735

Bandung	2012	0,36	2,240675791	18,95036	0,001118845812	68,1	0,481029
Bandung	2013	0,34	2,549405756	20,02972	0,001138929785	68,6	0,495843
Bandung	2014	0,37	2,681465199	21,2767	0,0011423081	69,1	0,505827
Bandung	2015	0,4	2,818840942	22,50796	0,00112579841	70,1	0,507387
Bandung	2016	0,4	3,206716254	23,93273	0,001180828452	70,7	0,539658
Bandung	2017	0,39	2,82154124	23,66501	0,001065254	71,0	0,574606
Bandung	2018	0,481	4,094041	24,41466	0,001058905	71,8	0,581097
Bandung	2019	0,355	4,101567	25,64185	0,00105891	72,4	0,589012
Bandung	2020	0,414	1,266596015	20,41911	0,000662510565	72,4	0,597633
Bandung	2021	0,386	1,342482559	21,65188	0,000804973413	72,7	0,583964
Bandung	2022	0,370	1,843587835	22,93717	0,000909359898	73,2	0,59987
Sumedang	2011	0,33	2,070359971	24,26492	0,000992254884	66,2	0,585465
Sumedang	2012	0,37	2,153230095	25,48617	0,0010300242	67,4	0,563252
Sumedang	2013	0,37	2,50923267	26,92588	0,001103289517	68,5	0,610983
Sumedang	2014	0,33	2,889922019	28,33002	0,001088131605	68,8	0,671847
Sumedang	2015	0,35	2,926114401	29,88889	0,001091118868	69,3	0,683877
Sumedang	2016	0,37	3,174903974	31,39835	0,001126707364	69,5	0,701917
Sumedang	2017	0,39	3,510540313	30,64041	0,001022493	70,1	0,656087
Sumedang	2018	0,42	2,917749	31,70179	0,001010892	71,0	0,676733
Sumedang	2019	0,34	2,948705	33,39329	0,00101268	71,5	0,677012
Sumedang	2020	0,384	1,620792857	16,52657	0,000881513538	71,6	0,677453
Sumedang	2021	0,359	1,929055871	17,19175	0,001083660482	71,8	0,811323
Sumedang	2022	0,39	2,318083997	17,99112	0,001225934879	72,7	0,786927
Bandung Barat	2011	0,29	2,72470755	18,84971	0,001342934278	62,4	0,787281
Bandung Barat	2012	0,37	2,959394864	19,66249	0,001380490312	63,2	0,724664
Bandung Barat	2013	0,33	3,532220051	20,8248	0,001467972525	63,9	0,749684
Bandung Barat	2014	0,34	3,50920942	22,06329	0,001458084721	64,3	0,762133
Bandung Barat	2015	0,36	3,332815662	23,32061	0,001451247063	65,2	0,774131
Bandung Barat	2016	0,41	4,054018046	24,58667	0,001508324968	65,8	0,836402
Bandung Barat	2017	0,39	3,648899744	24,34486	0,001381193	66,6	0,877416
Bandung Barat	2018	0,36	3,163519	25,17948	0,001375992	67,5	0,878438
Bandung Barat	2019	0,36	3,20185	26,36166	0,00137599	68,3	0,894655
Bandung Barat	2020	0,376	2,323239731	164,53884	0,000680464788	68,1	1,074899
Bandung Barat	2021	0,356	2,639023961	175,2798	0,000962996327	68,3	1,107002
Bandung	2022	0,37	3,593267462	186,20659	0,001083590174	69,0	1,268648

Barat							
Tasikmalaya	2011	0,37	3,761315939	197,16357	0,001195757868	61,1	1,295522
Tasikmalaya	2012	0,33	3,593267462	205,95039	0,001256103775	61,7	1,344821
Tasikmalaya	2013	0,32	3,593267462	215,92836	0,001173508044	62,4	1,376892
Tasikmalaya	2014	0,29	4,846112354	228,2036	0,001152893281	62,8	1,399743
Tasikmalaya	2015	0,3	5,057701596	241,94938	0,001152893281	63,2	1,472432
Tasikmalaya	2016	0,3	5,5476	251,50279	0,001219550987	63,6	1,612313
Tasikmalaya	2017	0,32	5,479338894	242,97139	0,001105266	64,1	1,628231
Tasikmalaya	2018	0,353	6,192260817	251,77852	0,001096895	65,0	1,756261
Tasikmalaya	2019	0,322	6,16942949	265,13082	0,00109712	65,6	1,804833
Tasikmalaya	2020	0,343	1,315245412	10,37118	0,000722130954	65,7	0,425718
Tasikmalaya	2021	0,378	1,278898153	10,96296	0,000892633054	65,9	0,453382
Tasikmalaya	2022	0,38	1,700615326	11,64854	0,000998586961	66,8	0,444359
Bekasi	2011	0,325	1,966263741	12,38538	0,001112271883	68,7	0,434948
Bekasi	2012	0,363	2,126359715	13,17567	0,001127612951	69,4	0,435712
Bekasi	2013	0,329	2,663883507	13,97777	0,001218601913	70,1	0,430865
Bekasi	2014	0,328	2,649317932	14,86662	0,001197194996	70,5	0,4257
Bekasi	2015	0,345	2,51891854	15,82196	0,001197194996	71,2	0,432549
Bekasi	2016	0,309	3,265142065	16,86415	0,00124335924	71,8	0,460227
Bekasi	2017	0,336	2,65925303	16,88276	0,000818928	72,6	0,463164
Bekasi	2018	0,356	2,745654	17,48356	0,001111944	73,5	0,479405
Bekasi	2019	0,354	2,967833	18,45034	0,00111212	74,0	0,482075
Bekasi	2020	0,372	1,292508961	13,49026	0,00080384901	74,1	0,489817
Bekasi	2021	0,34	1,54819995	14,30743	0,001029606595	74,5	0,557086
Bekasi	2022	0,373	1,877875938	15,01289	0,000995993633	75,2	0,550134
Kuningan	2011	0,33	2,20508398	15,75065	0,001092495173	65,0	0,600843
Kuningan	2012	0,36	2,658681474	16,59093	0,001115055702	65,5	0,580729
Kuningan	2013	0,36	2,815768268	17,59179	0,001225932872	66,2	0,575083
Kuningan	2014	0,37	2,822788381	18,78949	0,00120031654	66,4	0,569252
Kuningan	2015	0,34	2,817585063	20,00688	0,001170272587	67,2	0,57212
Kuningan	2016	0,33	3,142920889	21,56172	0,00116736701	63,6	0,61201
Kuningan	2017	0,32	3,672007748	21,75454	0,00112792	64,1	0,625576
Kuningan	2018	0,4	3,1119	22,78875	0,001112159	68,6	0,614417
Kuningan	2019	0,435	3,01371	24,30077	0,00111242	69,1	0,783075
Kuningan	2020	0,361	2,022982025	106,17468	0,000814562743	69,4	0,880087
Kuningan	2021	0,349	2,916390596	111,42408	0,001004178461	69,7	0,917556
Kuningan	2022	0,35	3,191999447	120,29486	0,0011345302	70,2	0,888592
Majalengka	2011	0,31	3,623200797	126,74869	0,00118847847	62,7	0,912864
Majalengka	2012	0,39	4,094609349	132,45357	0,00124648447	63,1	0,873995
Majalengka	2013	0,39	4,04003745	141,12554	0,001250725634	63,2	0,970296
Majalengka	2014	0,34	4,459990423	148,35844	0,00123974002	64,1	1,010828
Majalengka	2015	0,35	4,364375852	157,31784	0,001245521327	64,8	1,026586
Majalengka	2016	0,36	4,847852746	163,94685	0,001325136164	65,3	1,018087
Majalengka	2017	0,35	4,348863671	157,71059	0,001211637	65,9	1,028735
Majalengka	2018	0,365	4,670671	166,94149	0,001199911	66,7	1,02379

Majalengka	2019	0,347	4,828596	177,47089	0,00119991	67,5	1,046734
Majalengka	2020	0,336	3,274956059	98,37872	0,001326116914	67,6	1,852165
Majalengka	2021	0,354	4,453109682	104,28698	0,001672614142	67,8	1,995032
Majalengka	2022	0,37	5,324125859	110,68528	0,001887770112	68,6	2,131478
Karawang	2011	0,32	6,051177096	117,3395	0,002055944991	65,2	2,137954
Karawang	2012	0,34	7,03657581	124,48698	0,002163439062	66,0	2,083234
Karawang	2013	0,32	7,330903331	131,76037	0,001917780234	66,6	2,155684
Karawang	2014	0,3	7,671640208	139,56145	0,001902004175	67,1	2,351753
Karawang	2015	0,34	7,715348116	148,20335	0,001919023527	67,7	2,356875
Karawang	2016	0,34	8,984354016	156,87601	0,002034853421	68,2	2,539196
Karawang	2017	0,34	7,82387166	154,1136	0,001849797	69,2	2,342939
Karawang	2018	0,331	8,708394	159,58955	0,001863199	69,9	2,445768
Karawang	2019	0,357	9,429443	167,96618	0,00186583	70,9	2,516743
Karawang	2020	0,327	1,025644318	29,89301	0,000517350526	70,7	0,340411
Karawang	2021	0,374	1,186324405	31,93434	0,000635154048	70,9	0,375959
Karawang	2022	0,35	1,414651207	34,21642	0,000722162721	71,7	0,360398